

Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya
(*Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya*)

Oleh: Lucky A. Attamimi
NIM: 071014068

Program Studi Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Semester Genap/Tahun 2013/2014

Abstrak

Implementasi pembangunan yang digencarkan pemerintah demi kepentingan rakyatnya seringkali menemui kendala yang sulit dalam menyelaraskan dua kepentingan yang berbeda. Hal ini seperti yang terjadi pada pembangunan tol tengah Kota Surabaya ini. Proyek ini dibuat untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Surabaya, namun hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari kalangan warga pinggiran rel Kota Surabaya. Pembangunan Tol Tengah Kota nantinya menggusur seluruh rumah di sisi timur rel kota Surabaya sebagai trayek jalan tol yang akan dibangun. Inilah yang mengawali kemunculan gerakan penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh warga pinggir rel ini yaitu TAP MPRS (Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya).

Penelitian ini menggunakan Teori resistensi oleh James C. Scott. Metodologi yang digunakan sejalan dengan kerangka teoritik yaitu metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposive dengan beberapa karakteristik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh TAP MPRS yang notabene adalah masyarakat urban, tergolong pada kategori perlawanan terbuka. Tindakan perlawanan mereka dilakukan secara terang-terangan dan sistematis. Fenomena perlawanan ini kerap ditemui pada masyarakat yang merasa keberadannya terancam, tertindas, dan mengalami dominasi atas kelompok lain.

Kata Kunci: *TAP MPRS (Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel), Resistensi, dan Pembangunan Tol Tengah Kota.*

Abstract

Implementation development implemented by the government in the interest of its people often meet constraints difficult in harmonize two different interests. It is this happened to toll development centre of Surabaya this. This project made to reduce traffic jam in Surabaya but it was not found a good response from among citizens pinggir rails city Surabaya. Toll development centre of displacing the whole house on the east rails city Surabaya route as toll road to be constructed. This is a new emergence of movement rejection and resistance done by people pinggir rails is 'TAP MPRS' (*Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya*).

This research uses the theory of resistance by James C. Scott. The methodology used in line with the framework of qualitative methodology i.e. with data collection techniques in the form of in-depth interviews and observations. Researchers using the technique of determination of informants are purposive with a few characteristics.

The results of this study showed that the action of the resistance made by the 'TAP MPRS' that in fact is the urban society, belongs to the category of open resistance. The actions of the resistance they are done openly and systematically. The phenomenon of this resistance is often found in people who feel threatened, oppressed his standing, and had dominance over other groups.

Keywords: *TAP MPRS (Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel), Resistance, and The Development Of The Toll In The City Center.*

Pendahuluan

Kebutuhan akan transportasi seharusnya seimbang dengan sistem sarana dan prasarana yang ada. Jika kita lihat yang telah diuraikan sebelumnya bahwa jumlah volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang ada di Kota Surabaya tidak seimbang tentu hal ini akan menjadi masalah. Keseimbangan itu nampaknya akan sulit terwujud karena kebutuhan akan transportasi warga Surabaya yang sulit dibendung sementara kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang terbatas ditunjang dengan mobilitas warga Kota Surabaya yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali beberapa alternatif guna mengatasi masalah transportasi tersebut, khususnya dalam menanggulangi kemacetan. Untuk menanggulunginya, diantaranya

perlu dilakukan berbagai kebijakan, seperti pembangunan sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan ruang jalan (Ofyar Z. Tamin 2000)

Tol Tengah Kota Surabaya ini telah tercantum dalam perda No. 35 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya pasal 21 ayat 3. Akan tetapi pembangunan TTKS hingga saat ini belum juga terlaksana. Meski pihak PT MJT selaku investor sudah mensosialisasikan desain teknis, desain rute, serta rancangan revitalisasi bagi warga yang terkena dampak proyek tersebut. Rancangan revitalisasi tersebut tertuang dalam bentuk Amdal (Analisa Dampak Lingkungan). Namun tol tengah kota Surabaya ini merupakan proyek yang cukup menjanjikan bagi beberapa pihak. Bagaimana tidak, tol

yang rencananya dibangun dengan desain jalur melintasi jalur utama dan juga jalan menuju pintu utama yang menghubungkan dengan pusat-pusat kota di sekitarnya tentunya akan menyedot banyak sekali pengguna jalan tol tersebut. Dengan income yang cukup besar hal ini sangat menguntungkan bagi pihak investor. Warga juga semakin dipermudah dengan adanya tol tengah kota ini karena mobilitas yang tinggi semakin didukung dengan prasarana yang ada sehingga jarak tempuh dapat diperpendek serta stres di jalan dapat dikurangi karena bebas hambatan.

Terlepas dari berbagai keuntungan dibangunnya tol tengah kota tersebut, tidak dapat kita lupakan bahwa pembangunan tol tersebut nantinya akan menemui hambatan. Seperti pembebasan lahan yang memakan banyak biaya, reaksi dan protes warga atas dibangunnya tol tengah kota tersebut. Permasalahan sosial seperti ini tidak dapat dengan mudah untuk diatasi. Karena hal ini berhadapan tidak hanya dengan permasalahan digusurnya rumah warga yang menjadi tempat tinggal mereka saja, namun sederet aktivitas sosial yang sudah menjadi rutinitas mereka juga akan terganggu.

Resistensi yang dilakukan oleh kaum minoritas seperti ini sudah sering mendapat perhatian dari para peneliti terdahulu seperti yang tercantum pada penelitian yang dilakukan oleh Azhar Anwari dalam skripsinya yang berjudul Resistensi komunitas sedulur sikep (Samin) terhadap rencana pembangunan pabrik semen. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa komunitas sedulur sikep tengah melakukan resistensi terhadap rencana pembuatan pabrik semen. Hal ini mencerminkan bahwa

fenomena penolakan yang terjadi terhadap suatu wacana 'pembangunan' sudah menjadi suatu fenomena di era reformasi. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh TAP MPRS yakni penolakannya terhadap ancaman penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah. Adanya partisipasi publik dalam suatu kebijakan pembangunan yang diturunkan oleh pemerintah menunjukkan suatu keberhasilan demokrasi yang menunjukkan bahwa masyarakatnya memiliki kemandirian dan andil yang tinggi. Dalam bentuk dukungan atau penolakan hal tersebut menjadi bukti bahwa rakyat bukanlah suatu boneka yang dapat begitu saja pasrah menerima kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah. Namun dengan respon yang mereka tunjukkan lewat dukungan maupun penolakan, menjadi suatu koreksi bagi setiap kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah apakah hal itu sudah sesuai dengan harapan rakyat atau belum. Karena setiap kebijakan yang diturunkan pun belum tentu sesuai dengan keinginan rakyat.

Penelitian ini nantinya akan menjawab faktor yang melatarbelakangi gerakan TAP MPRS untuk menolak pembangunan TTKS serta bentuk-bentuk resistensi atau gerakan perlawanan yang dilakukan untuk menolak pembangunan TTKS sebagai warga yang terkena dampak langsung dari pembangunan TTKS, yakni warga di sepanjang sisi timur rel ini yang berjuang dan bersatu dalam wadah TAP MPRS.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi warga pinggir rel yang tergabung dalam TAP MPRS untuk melakukan perlawanan kepada pihak Pemerintah Kota dan investor?
2. Bagaimana peranan dan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan TAPMPRS dalam menghadapi rencana penggusuran pemukiman sepanjang sisi timur rel kereta api untuk pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya (TTKS)?

Kajian Teori dan Metode Penelitian

Teori Resistensi

Menurut Scott, tujuan resistensi dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan. kesadaran kolektif yang dimiliki warga pemukiman pinggir rel sehingga membentuk suatu gerakan perlawanan yang memunculkan suatu tuntutan-tuntutan. Menurut teori yang dikemukakan Scott diatas, resistensi yang dilakukan para warga pinggir rel kereta api di Surabaya dengan wadah pergerakannya yang disebut TAP MPRS, akan melewati serangkaian tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu. Fase-fase tersebut ialah :

1. Fase pergerakan
2. Fase membangun kesadaran
3. Fase membangun Gerakan
4. Fase mempengaruhi kelompok sasaran
5. Fase capaian atau keluaran

Begitu juga resistensi para warga pinggir rel ini, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

resistensi secara terang-terangan atau tertutup. Dalam melakukan resistensi tertutup, model yang dipergunakan ialah bersifat diam-diam atau tidak dapat ditengarai bahwa itu adalah sebuah tindakan perlawanan. Dengan tetap mendirikan bangunan di lahan sepanjang pinggir rel hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dilakukan para pemukim liar adalah resistensi secara tertutup. demikian juga dengan dengan resistensi terbuka yang dilakukan, keadaannya masih bisa berkembang.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti fenomena perlawanan warga sisi timur rel kereta api dalam wadah TAP MPRS (Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya). Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lokasi penelitian ini berada di Kota Surabaya sebagai tempat pembangunan Tol Tengah Kota. Kemudian peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada 4 kecamatan yakni Wonokromo, Ngagel, Gubeng, Tambaksari, dan Sidotopo yang menjadi basis pergerakan dan menjadi tempat lahirnya kelompok yang disebut TAP MPRS (Tolak Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya).

Penentuan informan dilakukan secara purposive. Informan yang diambil adalah individu-individu yang memenuhi kriteria dan dianggap relevan untuk menjawab permasalahan bentuk-

bentuk resistensi yang dilakukan warga sisi timur rel kereta api Surabaya dalam menghadapi ancaman penggusuran.

Pembahasan

Mereka yang tergabung dalam paguyuban TAP MPRS secara terbuka menyatakan menolak pembangunan Tol Tengah Kota yang telah tercantum dalam RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah) pemerintah pusat. Terdapat banyak alasan kuat yang melatarbelakangi mereka dalam menolak pembangunan Tol Tengah Kota. Dapat digambarkan secara garis besar bahwa warga yang berada di sepanjang *stren* rel yang tempat tinggalnya terancam digusur untuk pembangunan Tol Tengah Kota memiliki beberapa kesamaan. Mereka pada umumnya menempati kelas menengah ke bawah, sehingga dalam keputusannya menolak pembangunan Tol Tengah Kota sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Meski hal itu bukan satu-satunya alasan mereka untuk menolak pembangunan Tol Tengah Kota, namun faktor ekonomi masih menjadi faktor kuat yang mendorong warga untuk menolak pembangunan Tol Tengah Kota.

Bentuk perlawanan dan perlawanan dari kelompok TAP MPRS terhadap pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya dilakukan dalam berbagai cara.

Menghimpun Kekuatan dan Menggerakkan Massa untuk Melakukan Demo

Menanggapi rencana pembangunan Tol Tengah Tengah Kota sejak diterbitkan melalui media massa pada tahun 2004, sontak membuat warga di sepanjang rel di Kota

Surabaya kaget. Dan hal itu memaksa beberapa warga sebagai perwakilan untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan diadakan di Masjid Raudlatul Fallah di Ngagel Rejo yang dihadiri oleh 32 RT yang berada di sepanjang rel tersebut guna mempersiapkan demonstrasi yang akan dilakukan perdana oleh warga pinggir rel. Sebagaimana menanggapi wacana pembangunan Tol Tengah Kota yang akan menggusur seluruh warga pinggir rel dengan jumlah ± 7000 rumah dengan 6.675 KK. Tentu hal ini tidak menjadi ancaman yang biasa bagi warga *stren* rel. Berita yang ditulis dalam surat kabar tersebut menyebutkan bahwa peta daerah pembangunan tol tengah kota sudah dibuat, dan rancangan tersebut telah disahkan oleh Pemerintah Kota dan DPRD Jawa Timur. Itu artinya rencana pembangunan Tol Tengah Kota tersebut memang telah digodok oleh anggota dewan yang usulannya berasal dari pemerintah kota sehingga keputusan tersebut tercantum dalam RTRW (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah) Kota Surabaya. Warga seakan kebakaran jenggot pada saat membaca berita ini dalam surat kabar. Mereka sangat kecewa dan hampir putus asa pada saat itu. Sebagai warga yang lingkungannya akan terkena dampak langsung, mereka sama sekali tidak diajak duduk untuk berbicara dan berunding mengenai masalah ini. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota serta solusi-solusi yang ditawarkan. Dengan situasi yang tegang dan cemas, para ketua RT di sepanjang rel kereta api kemudian mengadakan pertemuan pada pukul 15.00 WIB di Masjid Raudlatul Falah yang kemudian

menghasilkan keputusan untuk melakukan aksi demo pertama kalinya. Demo ini direncanakan secara spontanitas oleh warga sepanjang rel untuk menanggapi rencana pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya yang menurut berita akan menggusur seluruh rumah warga di sisi timur rel kereta api. Ke 32 ketua RT tersebut hanya membahas langkah darurat yang dilakukan menanggapi berita penggusuran akibat adanya pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya ini. Kemudian dari pertemuan ini disepakati bahwa keeseokan harinya warga berkoordinasi dan bersiap untuk melakukan demo ke kantor Walikota.

Membuat Kontrak Politik dengan Para Calon Legislatif

Tindakan resistensi yang dilakukan oleh TAP MPRS selain dengan berdemo turun ke jalan, yakni melakukan kontrak kerjasama politik dengan beberapa calon legislative. Hal ini dilakukan dengan alasan, legislative adalah lembaga yang secara sah untuk membuat, merumuskan, dan mengesahkan undang-undang, serta mengawasi pemerintahan. Jadi, jika para anggota legislative itu nantinya bisa pro dengan kepentingan warga pinggir rel yang terancam digusur, perumusan mengenai tol tengah kota dapat dihapuskan. Yang memiliki kewenangan untuk rencana pembuatan tol tengah sehingga sudah sah dimasukkan dalam RTRW pusat dan RTRW kota adalah DPR RI, DPRD tingkat I Provinsi Jawa Timur, dan DPRD tingkat II Kota Surabaya. Oleh karena itu para anggota TAP MPRS kemudian berfikir untuk melakukan tindakan yang efektif dapat mencegah dan

menggagalkan dari segi kewenangan pemerintahan. Selain melakukan demo turun ke jalan, melakukan public hearing, dan berdiskusi dengan para akademisi yang membantu melakukan resistensi terhadap pembangunan tol tengah kota, mereka juga menyambut baik adanya kerjasama kontrak politik dengan para calon legislative. Meski langkah yang diambil untuk melakukan kontrak politik dengan para calon legislative dinilai masih baru, namun hal ini terlihat efektif untuk menarik perhatian. Terbukti semakin bertambahnya calon legislative yang berniat untuk melakukan kontrak politik dengan warga pinggir rel kereta api.

Dalam kasus perlawanan TAP MPRS terhadap kebijakan pembangunan Tol tengah Kota Surabaya yang akan menggusur seluruh pemukiman di sepanjang rel kereta api Surabaya, fase-fase yang digambarkan James Scoot juga telah dilalui oleh TAP MPRS dalam mengartikulasikan kepentingannya untuk menolak penggusuran. Fase-fase tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Fase Pergerakan

Fase ini diawali dengan munculnya kegelisahan dan keresahan warga pinggir rel melihat di surat kabar tentang keberadaan mereka yang akan digusur oleh pemkot Surabaya karena pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya. Dengan munculnya berita pembangunan tol tengah kota ini, tentu mereka merasa gelisah dan gusar akan keberlangsungan kehidupan mereka jika penggusuran benar-benar terjadi. Sehingga mereka pun siap untuk melakukan gerakan.

2. Fase membangun kesadaran

Pada fase ini, ada dua aktor yang membantu membangun kesadaran

masyarakat. Pertama, dalam melakukan mobilisasi, terdapat pemimpin yang kharismatik untuk mendukung proses penggemblengan individu yang bergabung sehingga mereka berani melakukan langkah-langkah yang diarahkan pemimpinnya dalam suatu gerakan resistensi. Kedua, dalam melakukan proses resolisasi, terdapat pemimpin untuk membangun keyakinan diri atau kepercayaan diri anggota kelompok. Pada awal pergerakannya, TAP MPRS ini telah memiliki struktur keanggotaan dan kepemimpinan yang bagus. Mengingat solidnya organisasi ini, maka fase membangun kesadaran dapat dicapai dengan baik. Bahkan sejak tahun 2004 telah terbangun kesadaran kolektif lewat diskusi-diskusi rutin yang dilakukan oleh warga pinggir rel sehingga pada tahun 2005 TAP MPRS ini dapat resmi berdiri.

3. Fase membangun gerakan
Fase ini meliputi pengorganisasian gerakan, perumusan tujuan dan strategi mobilisasi aksi. Fase ini dilalui dengan melakukan rapat dengan anggota untuk merumuskan taktik perlawanan, tuntutan, dan penentuan hari dalam melakukan aksi perlawanan. Akhirnya pada pertemuan Juni 2005 mereka sepakat untuk melakukan demo yang akan dilakukan di Kantor Walikota. Bertepatan dengan diresmikannya paguyuban TAP MPRS, gerakan ini menjadi semakin terarah dan terkoordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang telah terbentuk memudahkan pembagian peranan dan tugas-tugasnya. Meski pada tahun sebelumnya yakni 2004 ketika berita pembangunan tol tengah kota muncul pertama kali, keesokan harinya mereka sudah berani

melakukan demo dan turun ke jalan. Demo tersebut merupakan bentuk spontanitas yang dilakukan warga atas pressing yang mereka dapat dari berita tersebut. Sehingga demo yang dilakukan masih belum terarah dan terkoordinasi dengan baik. Demo pada tahun 2005 dianggap sebagai langkah awal dalam proses membangun gerakan karena demo yang dilakukan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik dikarenakan adanya paguyuban TAP MPRS yang berhasil menyatukan ±40.000 warga dalam satu tujuan dan komando.

4. Fase mempengaruhi kelompok sasaran

Pada fase ini tugas dari gerakan adalah mempengaruhi publik lawan menjadi partisipan dan mendorong partisipan pasif menjadi kekuatan aktif. Fase ini ditunjukkan dengan kegiatan pemasangan spanduk penolakan rencana penertiban, penggalangan tanda tangan dukungan dan membagikan selebaran kepada pengguna jalan dan pihak internal warga pinggir rel sendiri. Kegiatan ini dimulai pada demo kedua yakni tahun 2005 ketika TAP MPRS baru diresmikan. Pada saat demo pertama yang mereka lakukan tahun 2004, sudah terdapat banner dan spanduk namun itu hanya sebagai atribut dan perlengkapan demo. Mereka mempersiapkan banner, spanduk, bendera, bahkan pamflet selain sebagai atribut demo tapi juga mereka bagikan kepada para pengguna jalan untuk menarik simpatinya. Tak lupa mereka selalu mengundang pihak media massa untuk meliput aksi mereka. Tujuannya adalah agar masyarakat Surabaya mengetahui bahwa seluruh rumah yang ada di sepanjang pinggiran rel akan digusur demi

dibangunnya tol tengah kota. Ketika masyarakat bersimpati terhadap keberadaan mereka, maka posisi tawar menawar akan semakin kuat di mata pemkot. Semakin banyak media massa yang meliput kegiatan mereka, maka kampanye penolakan terhadap penggusuran akan semakin menggema di ranah publik. Terbukti dengan dukungan pihak akademisi yang diperoleh TAP MPRS. Kontribusi yang mereka dapatkan semakin nyata ketika para akademisi ini turut terjun langsung dalam pergerakan yang dilakukan. Mereka juga mengajak organisasi-organisasi gerakan yang ada di Surabaya untuk terlibat dan mendukung perjuangan mereka. Selain itu mereka juga berusaha agar mendapat dukungan dari pihak pemerintahan dengan membangun hubungan pribadi dengan para anggota legislatif maupun dengan calon legislative serta pihak pemkot dan dinas terkait. Hubungan pribadi yang terjalin dengan baik nantinya diharapkan dapat menarik simpati Dukungan dari berbagai macam elemen pun mengalir, mulai dari organisasi massa, organisasi pemuda, LSM, dan lain-lain. Hingga terbentuklah kontrak politik diantara kedua belah pihak yang di dalamnya termuat jelas hak dan kewajiban serta tuntutan masing-masing pihak. Meski hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin sudah sampai pada tahap seperti ini, pihak legislative yang menjalin kontrak politik dengan TAP MPRS tidak bisa disebut sebagai wakil TAP MPRS dalam parlemen. Karena mereka hanya sebatas menerima, menampung, dan berusaha untuk menyuarakan kepentingan dan tuntutan TAP MPRS dalam perumusan kebijakan. Dukungan yang dilakukan sebatas

itu, bukan sebagai wakil langsung di parlemen atas nama TAP MPRS.

5. Fase capaian

Fase ini akan muncul apabila gerakan yang dilakukan berhasil mampu diintegrasikan ke dalam sejumlah struktur masyarakat. Fase capaian ini dilalui dengan hasil dari gerakan perlawanan yang mereka lakukan. Meski permasalahan ini belum menemui “goal” dari sekian lama sejak rencana pembangunan tol tengah ini bergulir, namun dengan pergerakan yang dilakukan oleh TAP MPRS sebagai usaha penolakan terhadap pembangunan Tol Tengah Kota yang akan menggusur rumah mereka, pergerakan ini sudah mampu diintegrasikan ke dalam sejumlah struktur sosial yang ada di masyarakat dalam bentuk dukungan nyata. Seperti pada ranah publik dengan simpati dan kontribusi nyata yang mereka dapatkan. Pihak akademisi yang turut memberi dukungan dalam berhadapan dengan pihak pemerintah dan investor, serta di pihak pemerintahan sendiri yang diantaranya mendukung gerakan ini. Pernyataan Bu Risma selaku Walikota Surabaya yang mendukung penuh warga pinggir rel agar tidak terjadi penggusuran serta menolak dibangunnya Tol Tengah Kota. Pihak DPRD Kota Surabaya dan DPRD Jawa Timur selaku pihak pembuat kebijakan diantaranya juga telah mendukung TAP MPRS dengan memberi fasilitas untuk public-hearing, mengadakan diskusi dan pertemuan dengan beberapa pihak, memberi pernyataan secara tegas untuk mendukung penuh warga pinggir rel agar terbebas dari penggusuran, serta melakukan kontrak politik sebagai bentuk dukungannya terhadap penolakan tersebut. Meski hal itu belum

mencapai fase keputusan akhir penghapusan tol tengah kota Surabaya dari RTRW Kota Surabaya. Dengan adanya banyak dukungan dan kontribusi nyata yang didapat dari masyarakat ini menandakan bahwa gerakan ini telah mampu diintegrasikan ke dalam sejumlah struktur social masyarakat.

Dari terminologi yang diungkapkan Scott diatas, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh TAP MPRS termasuk dalam resistensi yang bersifat sungguh-sungguh. Dilihat pada kategori pertama yakni terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, TAP MPRS dari awal terbentuknya sudah menunjukkan bahwa mereka mempunyai bentuk organisasi yang jelas disahkan dan dideklarasikan atas keputusan dan musyawarah bersama. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan bergerak secara sistematis melalui tahapan dan tindakan-tindakan aksi yang dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga menjadi kesepakatan bersama. Masing-masing anggota sangat kooperatif dalam usaha melakukan tindakan aksi. Mereka terintegrasi dalam wadah TAP MPRS. Dengan adanya kesadaran kolektif sehingga dapat mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain, bekerja sama, saling melengkapi dalam usahanya melancarkan aksi demi mencapai tujuan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Karakteristik social dan ekonomi warga pinggir rel yang tergabung dalam TAP MPRS berdasarkan

temuan data yang didapat menunjukkan bahwa warga pinggir rel menempati kelas ekonomi menengah ke bawah. Melihat karakteristik ekonomi mereka yang tergolong dalam kelas ekonomi menengah ke bawah, rumah merupakan suatu asset dan kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Meski tanpa rumah sebagai tempat berlindung pun mereka masih dapat hidup, namun rumah menjadi kebutuhan primer yang masih dianggap sebagai sesuatu yang berharga dan diperlukan pengorbanan besar untuk mendapatkannya. Apalagi jika dilihat dari diferensiasi pekerjaan yang dimiliki sebagian besar dari mereka masih banyak yang menempati sektor informal, tentu untuk mendapatkan sebuah rumah atau tempat tinggal dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus sangat menyesuaikan penghasilan yang diterima agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini yang memaksa warga pinggir rel untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah yang akan menggusur rumah mereka dengan alasan pembangunan tol tengah kota. Selain itu mereka memiliki keterikatan social yang kuat dan rasa persaudaraan yang tinggi antar warga yang menumbuhkan kesadaran kolektif dengan cepat untuk melakukan perlawanan agar rumah mereka dapat dipertahankan dari rencana penggusuran.

- TAP MPRS memiliki peran cukup besar dalam menghadapi kebijakan penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemkot Surabaya atas rencana pembangunan tol tengah kota. Sebagai suatu kelompok kepentingan, TAP MPRS dinilai cukup berhasil untuk mengartikulasikan kepentingan kelompoknya ke dalam beberapa sistem sosial yang lain. Sehingga TAP MPRS dapat dikenal di beberapa golongan masyarakat sebagai kelompok yang memperjuangkan kepentingan warga pinggir rel dari penggusuran Tol Tengah Kota Surabaya. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan serta usaha-usaha untuk mengartikulasikan kepentingannya tersebut dinilai cukup berhasil untuk memperlambat proses eksekusi tol tengah kota meski hingga detik ini masih belum keluar keputusan resmi mengenai pembatalan rencana pembangunan tol tengah kota. Usaha mereka dengan melakukan sharing, public-hearing, maupun diskusi dengan pihak pemerintahan akan membuat pihak pemerintahan mempertimbangkan lebih dalam lagi untuk membangun tol tengah kota. Mereka akan menghadapi puluhan ribu warga pinggir rel yang tergabung dalam TAP MPRS untuk menghalangi proses eksekusi yang akan terjadi. Meski belum pada tahap keputusan akhir mengenai dilanjut atau diberhentikannya pembangunan tol tengah kota ini, namun peran TAP MPRS sangat besar dalam mengintegrasikan gerakan perlawanan ini ke dalam sejumlah struktur masyarakat. Dukungan didapat dari Bu Risma selaku Walikota Surabaya yang dengan tegas akan mendukung penuh seluruh warga pinggir rel dan menolak pembangunan tol tengah kota.
- Bentuk resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel (TAP MPRS) dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya adalah melakukan serangkaian aksi perlawanan. Perlawanan dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan tidak berwujud dalam kekerasan, namun lebih kepada usaha untuk melakukan konsolidasi dalam menentukan sikap dan keputusan mengenai permasalahan yang memunculkan ketegangan antara kedua belah pihak, yakni masyarakat dengan pemerintah. Demonstrasi yang dilakukan pun tidak sampai pada tindak kerusuhan dan kekerasan namun lebih dimaksudkan sebagai perlawanan terbuka untuk mengartikulasikan kepentingan mereka di hadapan pemerintah langsung dan ranah publik. Karena dalam setiap demonstrasi yang dilakukan berujung pada keinginan TAP MPRS melalui perwakilannya untuk, berbicara, dan berdiskusi dengan pihak pemerintah agar menemui solusi yang tepat. Media massa juga menjadi alternatif ampuh untuk menarik simpati masyarakat dengan pemberitaan perjuangan mereka dalam melawan penolakan tol tengah kota yang akan menggusur rumah mereka. Sehingga dukungan yang didapat pun semakin banyak, dari berbagai kalangan dengan latar

belakang yang beragam. Mulai dari organisasi massa, organisasi kepemudaan, LSM, komunitas kedaerahan, dan pihak akademisi yang dengan sukarela membantu mereka dalam pergerakan ini. Disamping itu mereka juga menjalin hubungan pribadi dengan pihak pemerintahan, dari anggota legislatif yang sekarang menduduki kursi DPRD Surabaya, DPRD Jawa Timur, maupun yang masih menjadi calon anggota DPRD. Dengan hubungan pribadi yang terjalin baik tersebut para calon legislative yang akan melenggang ke kursi DPRD kini telah mengadakan kontrak politik dengan TAP MPRS. Hal itu tak lain dimaksudkan agar TAP MPRS mendapat dukungan dari segi pemerintahan selaku pihak pembuat kebijakan. Jika dukungan yang didapat semakin banyak, kepentingan akan semakin terartikulasi dengan baik ke dalam berbagai struktur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Scott James. (1981) *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: LP3ES.
- Bungin Burhan. (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hauser, Philip M. (1996) *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan, Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

- Sudarso dan Septi Ariadi. (2007) *Penelitian Kemiskinan di Perkotaan dan Alternatif Kebijakannya*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Hotman Siahaan. (1996) *Pembangkangan Terselubung Petani Dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Effendi, Tadjudin Noer. (2000) *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fatkhan, A. (2004) *Teori-teori Perubahan sosial*, Surabaya: Yayasan Kampusiana.
- Ramlan Subakti. (1992) *Memahami Ilmu Politik*.
- Alan Gilbert. (2007) *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yoga.

Skripsi

- Vernanto Yulian. (2010) *Dampak Penggusuran Pemukiman Liar di Perkotaan*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Azhar Anwari. (2010) *Resistensi komunitas sedulur sikep (Samin) terhadap rencana pembangunan pabrik semen*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Hendraven Desito Manihuruk. (2010) *Kelompok kepentingan dan kebijakan penertiban PKL*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Sudarso. (2005) *Resistensi Terselubung Buruh Anak Perkebunan*. Penelitian. Universitas Airlangga.

Internet

<http://korannusantara.com/warga-pinggir-rel-bersatu-lawan-penggusuran/>

www.green.kompasiana.com

www.tempo.com

www.kelanakota.suarasurabaya.net

www.antarajatim.com

www.centroone.com